

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Instrumen Data

Sebelum mengolah data ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yang pertama data yang telah diperoleh dari kuesioner dan wawancara akan di uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk melihat apakah tiap butir pernyataan valid sedangkan uji reliabilitas berguna untuk melihat apakah data tersebut reliabel dan dapat digunakan.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Uji validitas data penelitian ini menggunakan Korelasi Product Moment Pearson. Dalam metode ini dibandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut valid, dan sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan tersebut tidak valid. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,60 sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0,60 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian.

Uji Reabilitas merupakan data yang cukup dipercaya sebagai variabel dan data tersebut baik. Suatu data dikatakan reabilitas maka digunakan koefisien cornbach's alpha (α) dengan menggunakan SPSS. Koefisien reliabilitas $> r_{tabel}$ maka data dapat dikatakan reliable dan data dapat digunakan Siregar (2015)

Tabel 5. 1
Uji Validitas Data

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Butir1	0,291	0,176	Valid
Butir2	0,633	0,176	Valid
Butir3	0,477	0,176	Valid
Butir4	0,234	0,176	Valid
Butir5	0,353	0,176	Valid
Butir6	0,267	0,176	Valid
Butir7	0,624	0,176	Valid
Butir8	0,667	0,176	Valid
Butir9	0,637	0,176	Valid
Butir10	0,526	0,176	Valid
Butir11	0,402	0,176	Valid
Butir12	0,424	0,176	Valid
Butir13	0,202	0,176	Valid
Butir14	0,541	0,176	Valid
Butir15	0,295	0,176	Valid
Butir16	0,227	0,176	Valid
Butir17	0,279	0,176	Valid
Butir18	0,587	0,176	Valid
Butir19	0,421	0,176	Valid
Butir20	0,219	0,176	Valid
Butir21	0,509	0,176	Valid

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Dari tabel 5.1 di atas diketahui bahwa semua variabel valid karena r hitung dari tiap variabel lebih besar dari r tabel, dan reliabel karena nilai cronbach alpha memiliki nilai yang lebih besar dari 0,60 sehingga analisis dapat dilanjutkan.

Tabel 5. 2
Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.778	21

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 yaitu sebesar 0.778. Dengan demikian dapat disimpulkan jika data dinyatakan reliable dan dapat digunakan untuk penelitian.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser, yaitu dengan cara meregres variabel dependen dengan nilai *absolute* dari residual. Jika hasil pengujian diperoleh nilai sig > 0,05 maka tidak heteroskedastisitas:

Tabel 5.3
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.190	.060		3.184	.002
SOSEKO	-.015	.022	-.068	-.684	.496
KEPEM	.060	.072	.085	.833	.406
PANG	.017	.019	.100	.911	.364

a. Dependent Variable: ABS_RES

Dari tabel 5.3 menunjukkan bahwa probabilitas signifikasinya lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan model penelitian tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

B. Hasil Analisis Deskriptif

1. Kondisi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin.

Hasil analisis deskriptif untuk kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo yang diambil dari 3 (tiga) desa rawan pangan tersebut yaitu Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh, Desa Giripeni Kecamatan Wates, Desa Hargotirto Kecamatan Kokap. Berikut ini digambarkan kondisi ketahanan pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo dengan 4 (empat) indikator yang menentukan kondisi ketahanan pangan yaitu:

- a. Ketersediaan Pangan
- b. Akses Pangan
- c. Stabilitas Pangan
- d. Kualitas Pangan

Dari 4(empat) indikator tersebut peneliti membuat 21 butir pertanyaan dengan 5 (lima) skala kondisi ketahanan pangan:

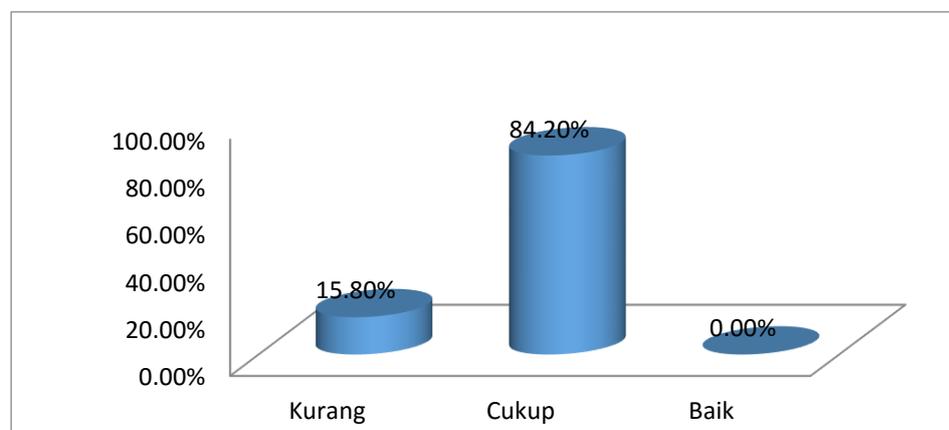
- a. Kondisi Kurang : Rentang Nilai 21- 49
- b. Cukup : Rentang Nilai 50-77
- c. Baik : Rentang Nilai 78-106

Tabel 5. 4
Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin di Kulon Progo

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	19	15,8	15,8
	Cukup	101	84,2	100,0
	Baik	0	0	
	Total	120	100,0	100,0

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Dari hasil tabel diatas tingkat ketahanan pangan pada rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo sebanyak 101 responden berada dalam kategori cukup, dan 19 responden dalam kategori masih kurang, dan belum ada dalam kategori baik. Hal ini bisa dikatakan tingkat kondisi ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan.



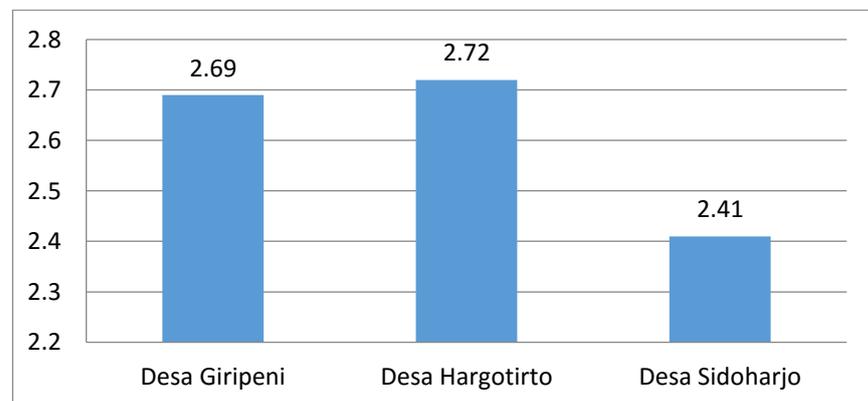
Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Gambar 5. 1
Presentase Ketahanan Pangan RTM di Desa Rawan Pangan Kulon Progo

Dari hasil penelitian yang digambarkan dengan grafik sebagian besar rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo cukup tahan pangan, namun belum bisa dikatakan baik, ketahanan pangan pada kategori

cukup sebesar 84,2%. dan ketahanan pangan pada kategori kurang sebesar 15,80%. hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa desa rawan pangan masih dalam keadaan masih rawan. Aspek yang dilihat disini adalah konsumsi pokok rumah tangga miskin adalah nasi dari beras. dikarenakan menurut Budijanto (2016). Dalam masyarakat Indonesia beras menjadi konsumsi makanan pokok yang menyumbang energi per kapita lebih dari 54% dari total energi konsumsi masyarakat Indonesia dan juga terdapat kultural bahwa di Indonesia apabila belum makan nasi dikatakan belum makan. Sehingga disimpulkan bahwa makanan pokok di Indonesia adalah beras. Ada 4(empat) indikator yang mendasari ketahanan pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo, DIY. Indikator tersebut antara lain:

a. Ketersediaan Pangan Rumah tangga Miskin



Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

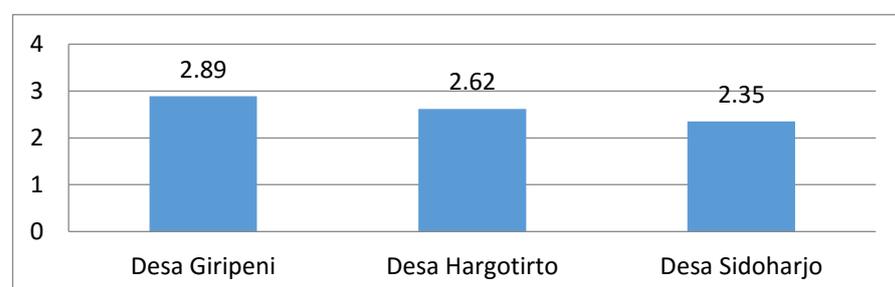
Gambar 5. 2
Presentase Ketersediaan Pangan RTM
di Desa Rawan Pangan KulonProgo

Berdasarkan Grafik diatas Ketersediaan pangan dalam rumah tangga miskin dilihat dari persediaan tipe pangan pokok. Tipe pangan

pokok yang utama adalah beras. Rumah tangga yang mengganti tipe pangan pokok beras menjadi alternatif menunjukkan bahwa ketahanan pangannya terganggu. Adapun rasa kekhawatiran akan persediaan jumlah beras yang ada juga diteliti pada rumah tangga miskin. Semakin sedikit persediaan beras yang dimiliki maka rumah tangga miskin semakin khawatir. Dari gambar tersebut terlihat bahwa ketersediaan pangan responden yang diteliti, rata-rata tertinggi ada pada rumah tangga miskin di Desa Hargotirto sebesar 2,72% sedangkan rata-rata terendah ada pada rumah tangga miskin di Desa Sidoharjo sebesar 2,41%.

Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa butuh adanya program-program pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan pangan. Adapun kebijakan lumbung pangan yang ada fungsi di lapangan kurang efektif, hal ini dikarenakan lumbung pangan yang ada hanya berfokus untuk menyimpan benih padi sedangkan pengoptimalan pada distribusi kepada masyarakat masih kurang.

b. Akses Pangan Rumah tangga Miskin



Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

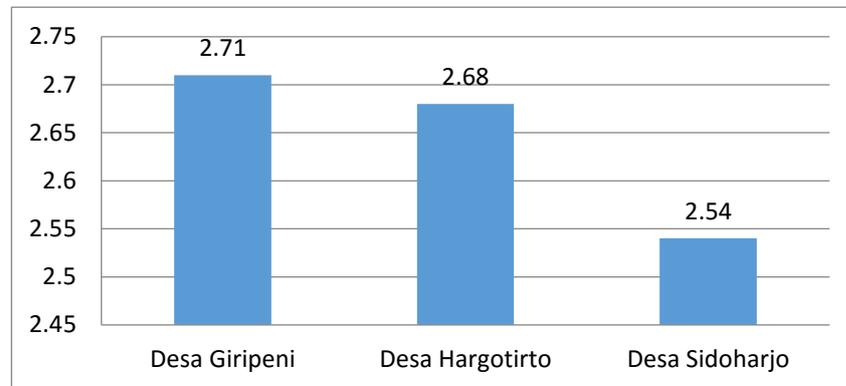
Gambar 5. 3

Presentase Akses Pangan RTM di Desa Rawan Pangan Kulon Progo

Indikator aksesibilitas atau keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga miskin diukur dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, jaringan yang dimiliki, serta kemampuan daya beli. Dari grafik persentase terlihat bahwa akses pangan responden yang diteliti, rata-rata tertinggi ada pada rumah tangga miskin di desa Giripeni sebesar 2,89% sedangkan rata-rata terendah ada pada rumah tangga miskin di desa Sidoharjo sebesar 2,35%.

Dari uraian diatas diambil kesimpulan bahwa butuh adanya kebijakan serta program pemerintah dalam meningkatkan akses pangan. Salah satu caranya ialah membangun KUD (Koperasi Unit Desa) pusat dan KUD pada tiap desa dimana KUD pusat menghimpun hasil panen dan olahan pangan yang berasal dari desa yang memiliki surplus pada perolehan beras padi dan olahan pangan lainnya yang nantinya akan disalurkan pada desa yang kekurangan beras atau akses pangan kurang, hal ini tentunya akan menguntungkan semua pihak dimana petani yang surplus beras mendapatkan kemudahan dalam menjual padinya dan masyarakat pada daerah rawan pangan mendapatkan beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi dikarenakan beras tersebut didapatkan diwilayah Kabupaten Kulon Progo.

c. Stabilitas Pangan



Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Gambar 5. 4
Presentase Stabilitas Pangan Rumah Tangga Miskin
di Desa rawan pangan Kulon Progo DIY

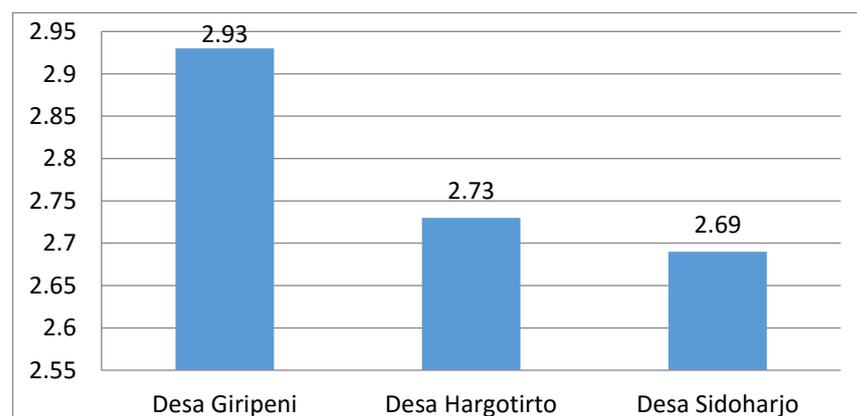
Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga miskin diukur berdasarkan frekuensi konsumsi makanan anggota rumah tangga dalam sehari dan cara mengatasi masalah pangan. Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai rata-rata tertinggi stabilitas pangan rumah tangga miskin di DIY ada pada rumah tangga miskin di Desa Giripeni sebesar 2,71% sedangkan nilai rata-rata terendah ada pada rumah tangga miskin di Desa Sidoharjo sebesar 2,54%.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa butuh adanya peningkatan stabilitas pangan, untuk mendapatkan tingkat pangan yang stabil dibutuhkan pengembangan pada program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) atau pengoptimalan pekarangan rumah tangga miskin yang berguna membantu menutupi kekurangan pangan rumah tangga miskin, dari fakta dilapangan diperoleh hasil bahwa program

KRPL berlangsung optimal hanya pada rumah tangga yang memiliki pekarangan yang luas sehingga pada rumah tangga yang memiliki lahan yang sempit program KRPL belum bisa dijalankan secara efektif, sehingga dibutuhkan pelatihan penggunaan hidroponik yang ditujukan pada rumah tangga miskin yang memiliki lahan yang sempit.

d. Kualitas Pangan

Kualitas pangan yang dikonsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ukuran kualitas pangan seperti ini sangat sulit didapatkan karena melibatkan berbagai macam jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan pangan hanya dilihat dari 'ada' atau 'tidak'nya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga, sehingga kualitas pangan sendiri dapat diukur dari keberagaman pangan yang dikonsumsi yang mencakup 4 sehat 5 sempurna.



Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Gambar 5. 5
Presentase Kualitas Pangan Rumah Tangga Miskin
di Desa Rawan Pangan Kulon Progo

Dari presentase gambar diatas kualitas pangan di atas terlihat bahwa rata-rata tertinggi kualitas pangan ada pada rumah tangga miskin di Desa Giripeni sebesar 2,93% sedangkan nilai rata-rata terendah ada pada Desa Sidoharjo sebesar 2,69% dan Desa Hargetirto sebesar 2,73%.

Dari hasil diatas diperoleh kesimpulan bahwa kualitas pangan yang berada pada 3(tiga) desa tersebut masih berada pada kondisi cukup dan perlu adanya peningkatan. Salah satu caranya yaitu melalui Program Desa Mandiri Pangan dengan melakukan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dimana pelatihan tersebut berfokus peningkatan produktifitas, dimana apabila program tersebut berjalan secara optimal maka akan memberikan output meningkatkan pendapatan yang berdampak langsung kualitas pangan.

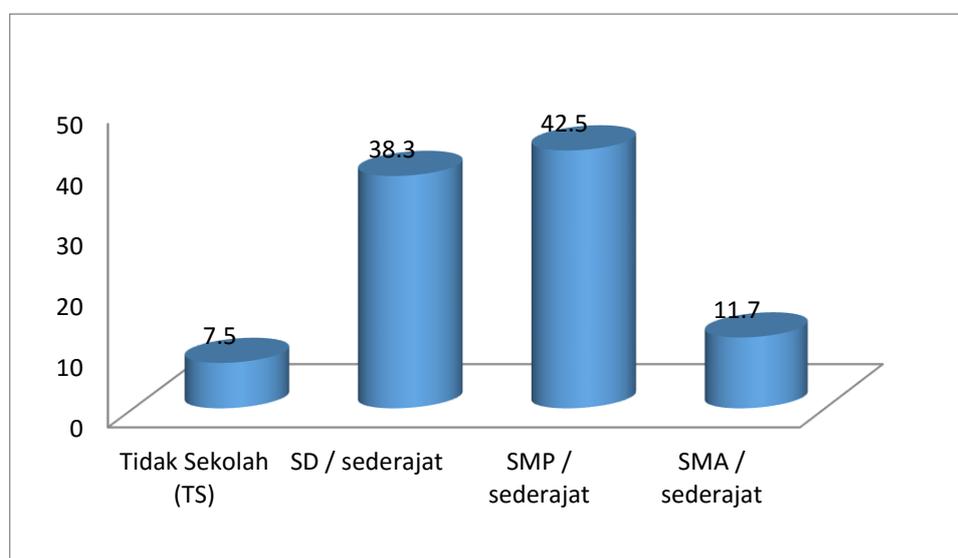
1. Kondisi Status Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin Desa Rawan Pangan

Status sosial ekonomi merupakan kedudukan atau strata pada suatu rumah tangga. Dalam penelitian ini status sosial ekonomi digambarkan dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kualitas hidup manusia serta status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dari orang yang bersangkutan maupun anggota rumah tangganya. Faktor pendidikan rumah tangga miskin mewakili kualitas atau kemampuan seseorang mengelola ekonomi rumah

tangga serta kesempatan untuk memperoleh nilai tambah ekonomi yang umumnya ditentukan oleh tingkat pendidikan pada rumah tangga tersebut. Karakteristik pendidikan dapat menjadi kriteria untuk menyusun program pengentasan kemiskinan, dengan menyesuaikan metode pemberdayaan dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga berdasarkan hasil penelitian responden di desa rawan pangan Kulon Progo sebagai berikut:



Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Gambar 5. 6
Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Miskin
di Desa Rawan pangan Kulon Progo

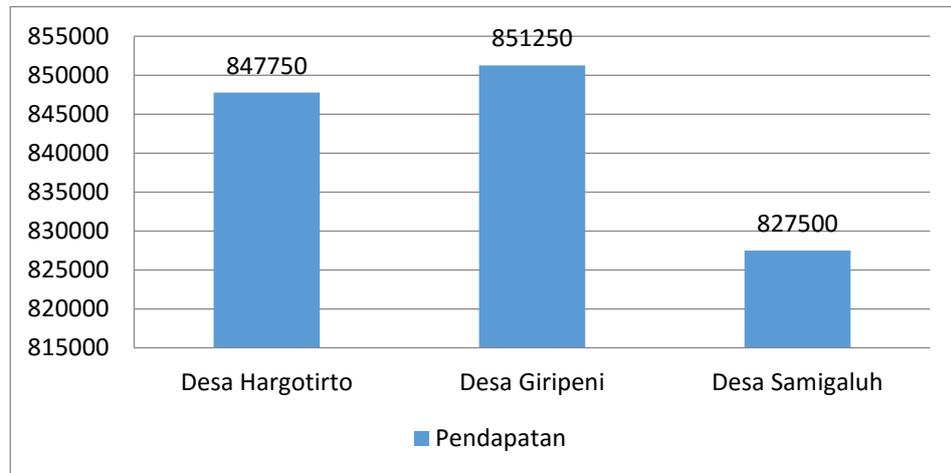
Berdasarkan grafik diatas menyatakan bahawa tingkat pendidikan masyarakat rumah tangga miskin di Desa Rawan Pangan Kulon Progo di dominasi oleh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebesar 51 responden atau sekitar 42,5%, dan diikuti oleh responden yang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 46 responden atau 38,3%, kemudian pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 14 responden dan sebanyak

9 responden, pada masyarakat Tidak Sekolah (TS). sedangkan untuk sarjana tidak ada responden yang memiliki jenjang pendidikan tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan responden mayoritas berada pada tingkat pendidikan SD dan SMP, dari persentase dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat akan pendidikan masih kurang hal ini dikarenakan tuntutan sosial dimana kebanyakan masyarakat rumah tangga miskin lebih mementingkan mencari pekerjaan ketimbang melanjutkan jenjang pendidikan. Disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masih kurang, tingkat pendidikan yang kurang ini mempengaruhi kualitas SDM yang berdampak langsung pada tingkat pendapatan masyarakat miskin.

b. Pendapatan

Pendapatan rumah tangga miskin mencerminkan produktifitas ekonomi. Semakin tinggi pendapatan maka dapat diduga bahwa rumah tangga tersebut memiliki produktifitas yang tinggi sama halnya bahwa jika pendapatan tinggi akan menentukan status sosial ekonomi seseorang berdasarkan hasil penelitian pendapatan responden di desa rawan pangan Kulon Progo sebagai berikut

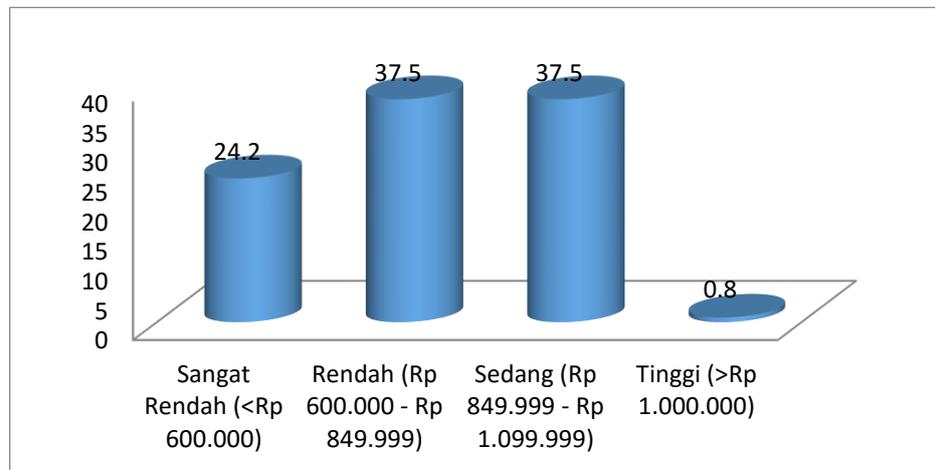


Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Gambar 5. 7

Presentase Rata- Rata Pendapatan Rumah TanggaMiskin di Desa Rawan Pangan Kulon Progo

Adapun rata-rata pendapatan tertinggi didominasi oleh desa Giripeni sebesar Rp 851.250 dan desa Samigaluh tergolong rata-rata pendapatan terendah yaitu sebesar Rp 827.500 diikuti Desa Hargotirto sebesar Rp 847.750 dan rata-rata pendapatan di desa rawan pangan Kulon Progo. Menurut penelitian Josephine, Sinaga, Lubis, dan Darus (2017) kenaikan pendapatan menambah kenaikan pengeluaran pangan juga cenderung bagi ibu rumah tangga yang menambah atau mengubah menu makanan keluarga, baik dari segi kuantitas, kualitas, ataupun harga sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan. Rata-rata pendapatan disetiap desa rawan pangan sebagai berikut:

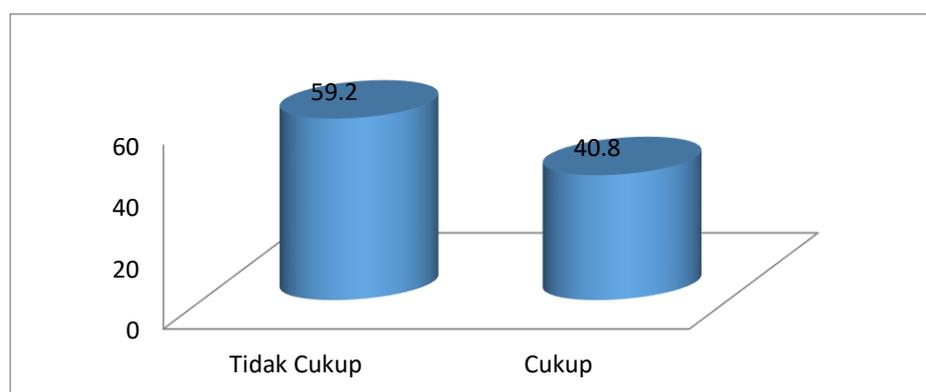


Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Gambar 5. 8

Presentase Rata-Rata Pendapatan Keseluruhan Rumah Tangga Miskin di Desa Rawan Pangan Kulon Progo

Dari grafik diatas rata-rata pendapatan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo sebesar Rp 842.200,00. Besarnya pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan non pangan. Berikut ini menunjukkan alokasi pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan.



Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Gambar 5. 9

Presentase Alokasi Pendapatan Rumah Tangga Miskin

Sebagian besar dari data responden rumah tangga miskin di desa rawan pangan menyatakan bahwa pendapatan rumah tangga miskin tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sebesar 59,2% atau 71 responden. sisanya menyatakan pendapatan rumah tangga mencukupi kebutuhan rumah tangga sebesar 40,8% atau sekitar 49 responden, sehingga dibutuhkan program-program untuk kualitas SDM guna meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin.

2. Efektifitas Kebijakan

a. Program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)

KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) merupakan program kebijakan yang menggunakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah tangga miskin yang ramah lingkungan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta gizi sehingga dapat terjadi diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, dan dapat melestarikan tanaman pangan lokal sehingga dapat mengurangi kerawanan pangan. Dari hasil penelitian program KRPL dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 5
Efektifitas Program KRPL

No	Efektifitas Program KRPL	F	%
1	Ya	75	62.5
2	Tidak	45	37.5
Jumah		120	100

Sumber : Data Primer 2017

Efektifitas program KRPL dilihat dari frekuensi jawaban responden dimana 62.5% menyatakan bahwa program KRPL memberikan efektifitas, sedangkan 37,5% menyatakan Program KRPL

tidak memberikan efektifitas, adanya responden yang menyatakan program KRPL tidak memberikan efektifitas dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa serta kurangnya luas lahan pekarangan rumah tangga miskin sehingga diperlukan solusi untuk masalah tersebut, dibutuhkan sosialisasi mengenai manfaat dari KRPL sehingga rumah tangga miskin termotivasi untuk melaksanakan program tersebut serta dibutuhkan pelatihan hidroponik untuk mensiasati pekarangan rumah yang sempit.

b. Program Lumbung Pangan

Lumbung pangan merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan ketahanan pangan yaitu program pemerintah dengan memberikan bantuan benih padi kepada kelompok tani pada tiap desa. Pada hasil penelitian diperoleh hasil bahwa program lumbung pangan memberikan efektifitas pada rumah tangga miskin, namun program tersebut memberikan efektifitas yang rendah pada desa yang berada pada perbukitan atau pegunungan yang minim lahan persawahannya. Hasil penelitian menunjukkan jawaban mengenai efektifitas program lumbung pangan, hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 5.5

Tabel 5. 6
Efektifitas Program Lumbung Pangan

No	Efektifitas Program Lumbung Pangan	F	%
1	Ya	62	51.7
2	Tidak	58	48.3
Jumlah		120	100

Sumber : Data Primer 2017

Efektifitas program lumbung pangan dilihat dari frekuensi jawaban responden dimana 51,7% menyatakan bahwa program lumbung pangan memberikan efektifitas, sedangkan 48,3% menyatakan program lumbung pangan tidak memberikan efektifitas, tingginya angka tidak setuju pada efektifitas program lumbung pangan dikarenakan bantuan benih padi yang diberikan pemerintah belum bisa dikelola dengan baik oleh daerah rawan pangan sehingga benih padi hanya tertumpuk digudang menjadi berjamur dan hasil kualitas padi menurun, kebanyakan dari rumah tangga miskin tidak memerlukan benih padi untuk ditanam tetapi memerlukan beras sehingga diperlukan upaya dalam merevilatisasi lumbung pangan melalui pemberdayaan sistematis dan berkesinambungan dalam program lumbung pangan yang saat ini hanya digunakan untuk cadangan pangan namun dapat pula dijadikan tempat untuk rumah tangga miskin membeli beras secara langsung.

c. Program Desa Mandiri Pangan

Desa Mandiri Pangan merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin atau rawan pangan menjadi masyarakat yang mandiri sehingga dapat mengurangi kemiskinan ataupun kekurangan gizi dan dapat mewujudkan ketahanan pangan. Dalam program desa mandiri pangan pemerintah memberikan berupa bantuan dana dalam pemberdayaan masyarakat agar kualitas SDM meningkat. Dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa 50,38% menyatakan bahwa program mandiri pangan

memberikan efektifitas, sedangkan 49,17% lainnya menyatakan program desa mandiri pangan tidak memberikan efektifitas.

Tabel 5. 7
Efektifitas Program Mandiri Pangan

No	Efektifitas Program Mandiri Pangan	F	%
1	Ya	61	50.83
2	Tidak	59	49.17
Jumlah		120	100

Sumber : Data Primer 2017

Salah satu hal yang menyebabkan tingginya responden yang menyatakan program tidak memberikan efektifitas dikarenakan peranan *stakeholder* yang belum optimal sehingga dana yang diberikan pada desa hanya digunakan untuk simpan pinjam tanpa adanya pendampingan dan pengawasan dari *stakeholder* terkait. Dibutuhkan pengembangan lainnya agar dana yang diberikan pada desa memberikan efek yang optimal dengan cara menggunakan dana yang diporeleh dari pemerintah digunakan dalam kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dimana dana yang diberikan pemerintah digunakan untuk bantuan modal usaha melalui pendampingan, pengawasan serta penyuluhan oleh *stakeholder* terkait.

3. Pengujian Hipotesis Pengembangan Model

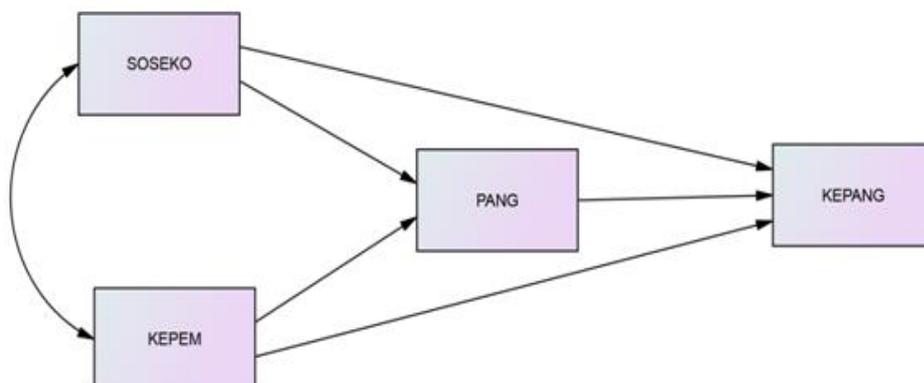
a. Pendahuluan

Pada awalnya peneliti melakukan pengkajian terhadap teori-teori pendukung dan hasil-hasil penelitian yang relevan untuk membuat model hipotetik awal. Kegiatan tersebut dimulai dari pembentukan konsep variabel, definisi operasional dan indikator dari variabel status sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah mengenai ketahanan pangan.

b. Pengembangan Model Hipotetik

Hasil model yang ditemukan dari kajian teori tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melibatkan para pakar di bidangnya melalui kegiatan wawancara pada pihak terkait. Model hipotetik yang dikembangkan dari teori yang dikaji lebih jauh untuk melihat ketepatan dan keakuratan model. Dari hasil kajian tersebut ditemukan bahwa secara keseluruhan model yang dikembangkan dapat diterima. Menurut pakar yang terlibat menyatakan pengukuran variabel konsumsi dibagi dua, yaitu konsumsi pangan dan konsumsi non pangan. Variabel status sosial ekonomi diukur dengan melihat pendapatan dan Pendidikan serta Variabel Kebijakan Pemerintah Ketahanan Pangan yang digunakan adalah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Lumbung Pangan, Desa Mandiri Pangan. Adapun variabel ketahanan pangan diukur dengan melihat indikator ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas pangan, dan kualitas pangan.

Berdasarkan persamaan teoretis tersebut dilakukan pengujian secara empiris terhadap data dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antara dua atau lebih variabel dimana memungkinkan pengujian dengan menggunakan variabel perantara Imam Ghozali (2012).



Sumber : Data Path Analysis 2017

Gambar 5. 10
Model Teoritis Analisis Jalur (Path Analysis)

Keterangan:

X1 = Variabel SOSEKO atau Sosial Ekonomi

X2 = Variabel KEPEM atau Kebijakan Pemerintah

X3 = Variabel PANG atau Konsumsi Pangan

Y = Variabel KEPANG atau Ketahanan Pangan

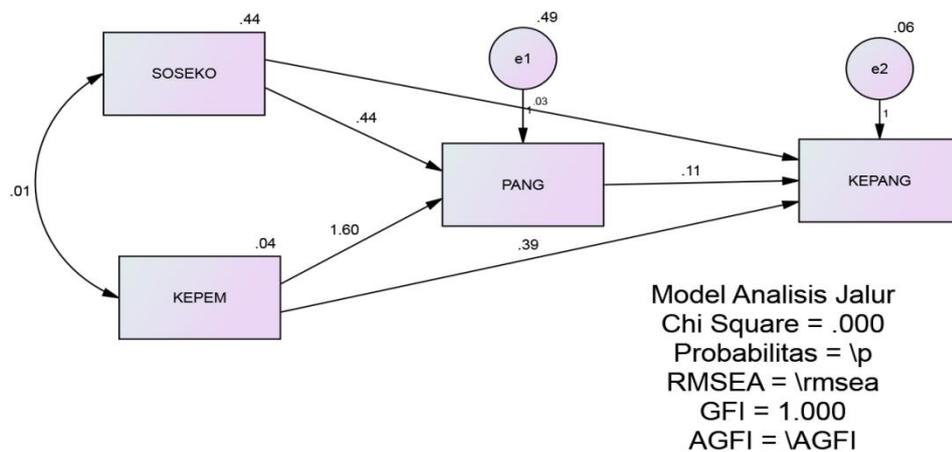
Pengukuran ketahanan pangan (KEPANG) diukur dari aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, stabilitas pangan dan kualitas pangan, sementara itu pengukuran konsumsi pangan (PANGAN) menggunakan besarnya pengeluaran rumah tangga miskin untuk konsumsi pangan selama satu bulan dalam satuan rupiah. Pengukuran sosial ekonomi (SOSEKO) diukur dari aspek pendidikan dan pendapatan rumah tangga miskin, sementara itu pengukuran kebijakan pemerintah (KEPEM) menggunakan kebijakan pemerintah berupa program KRPL, lumbung pangan dan mandiri pangan.

c. Uji Lapangan

Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui konsistensi model yang telah dikembangkan secara empiris pada 3(tiga) desa rawan pangan Kulon Progo, DIY. Dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 120 responden. Hasil pengujian ini diharapkan mampu menghasilkan model yang fit yang diharapkan mampu memecahkan masalah pada ketahanan pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo, DIY.

4. Hasil Uji Model dengan Analisis Jalur

Berdasarkan hasil pengembangan model menggunakan status sosial ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam berbagai tahap ditemukanlah



Sumber: Hasil Olah Data Path Analysis Tahun 2017

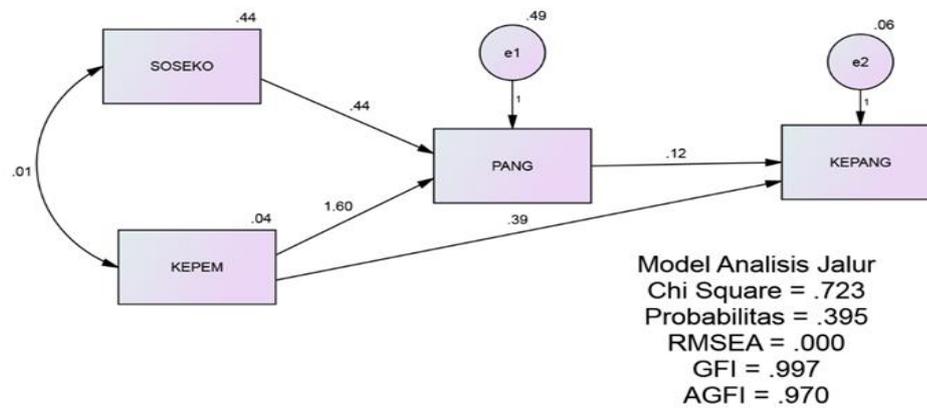
Gambar 5. 11
 Model Teoritis Analisis Jalur

Tabel 5. 8
Hasil Regresi Model Teoritis

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PANG <--- SOSEKO	.442	.098	4.519	***	par_1
PANG <--- KEPEM	1.595	.321	4.963	***	par_2
KEPANG <--- PANG	.106	.033	3.207	.001	par_3
KEPANG <--- KEPEM	.395	.127	3.099	.002	par_5
KEPANG <--- SOSEKO	.032	.038	.852	.394	par_6

Sumber: Hasil Olah Data Path Analysis Tahun 2017

Berdasarkan model di atas terlihat bahwa pengaruh langsung kondisi sosial ekonomi terhadap ketahanan pangan hanya sebesar 0,03 dan pengujian t tidak signifikan yaitu sebesar 0.394 lebih besar dari 0,05, sedangkan apabila variabel dikatakan signifikan dan terdapat pengaruh langsung jika nilai t harus lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$), sehingga variabel sosial ekonomi tidak mempunyai pengaruh secara langsung terhadap ketahanan pangan, namun sosial ekonomi menurut hasil data diatas mempunyai pengaruh secara langsung terhadap pangan sebesar 0,44 dan pengujian t signifikan yaitu sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$) artinya apabila sosial ekonomi meningkat maka pengeluaran konsumsi pangan akan meningkat dan akan mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan, hal ini sesuai dengan penelitian (Mustofa, 2012) pendapatan mempengaruhi secara tidak langsung terhadap ketahanan pangan dan serupa Josephine, Sinaga, Lubis, dan Darus (2017) kenaikan pendapatan menambah kenaikan pengeluaran pangan juga cenderung bagi ibu rumah tangga yang menambah atau mengubah menu makanan keluarga, baik dari segi kuantitas, kualitas, ataupun harga sehingga mempengaruhi ketahanan pangan, sehingga peneliti memodifikasi menjadi sebagai berikut :



Sumber: Hasil Olah Data Path Analysis Tahun 2017

Gambar 5. 12

Model Empiris Analisis Jalur Pengembangan Model

Menurut (Widarjono (2010) dalam bukunya “Analisis Statistika Multivariat Terapan” setelah peneliti melakukan estimasi analisis faktor konfirmatori, langkah selanjutnya dalam menginterpretasikan hasil dari analisis faktor konfirmatori adalah mengevaluasi kesesuaian atau kebaikan suatu model secara menyeluruh (*goodness of fit index*) yang dalam bahasa Indonesia disebut "uji kelayakan model". terdapat beberapa metode untuk menguji kebaikan atau kesesuaian suatu model secara menyeluruh, yaitu menggunakan kriteria sebagai berikut

- 1) Nilai Chi Square kecil lebih besar dari 0,05
- 2) Nilai Probabilitas lebih besar dari 0,05
- 3) Nilai RMSEA lebih kecil dari 0,08
- 4) Nilai GFI lebih dari 0,90
- 5) Nilai AGFI lebih dari 0,90

Tabel 5. 9
Pengujian Kesesuaian Model

Ukuran	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Chi Square	0,723		
p-value	0,395	>0,05	Fit
RMSEA	0.000	<0,08	Fit
GFI	0,997	>0,90	Fit
AGFI	0,970	>0,90	Fit

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian model di atas ditemukan bahwa semua ukuran yang digunakan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa model teoretis yang dikembangkan fit dengan data empiris.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan program AMOS Versi 7.0 dan SPSS Versi 20.0, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Kondisi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin

Secara umum kondisi ketahanan pangan pada rumah tangga miskin di desa rawan pangan, Kulon Progo DIY yang diambil dari 120 responden dari 3 (tiga) desa rawan pangan yaitu Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh, Desa Hargotirto Kecamatan Kokap dan Desa Giripeni Kecamatan Wates. berada pada kategori cukup tahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 10
Tingkat Ketahanan Pangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang	19	15.8	15.8	15.8
Cukup	101	84.2	84.2	100.0
Baik	0	0	-	
Total	120	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Dari hasil olah data diatas menunjukkan bahwa tingkat ketahanan pangan rumah tangga miskin adalah dikategori cukup tahan pangan dengan tingkat presentase 84,2% dan frekuensi sebesar 101 responden. Rata-rata kondisi tertinggi ketahanan pangan yang cukup tahan yaitu Desa Giripeni Kecamatan Wates, kemudian Desa Hargetirto kecamatan Kokap dan yang terakhir Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh dengan dilihat dari indikator aspek ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas pangan dan kualitas pangan yang saling berkesinambungan. Menurut Badan Ketahanan Pangan (2016) Apabila masyarakat suatu Negara tidak memenuhi salah satu dari indikator ketahanan pangan maka suatu Negara tidak dapat dikatakan sebagai Negara yang memiliki ketahanan pangan yang baik walaupun pada tingkat nasional serta regional pangan tercukupi namun apabila seseorang tidak dapat mengakses dari ketersediaan pangan, ataupun indikator yang lain maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan negara berada dalam posisi yang rapuh oleh karena itu dari 4 (empat) indikator tersebut harus terpenuhi.

Dari 4 (empat) indikator dari aspek akses pangan, Stabilitas Pangan, Kualitas Pangan Desa Giripeni unggul dari desa lain, namun dalam aspek ketersediaan pangan masih belum memenuhi sehingga Desa Giripeni dalam kategori cukup tahan pangan belum memasuki kategori baik atau tahan pangan, namun hal lain yang menjadi faktor permasalahan di Desa Giripeni yaitu dikarenakan jumlah produksi padi atau beras yang dihasilkan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga kekhawatiran terhadap ketersediaan beras atau makanan pokok menjadi terancam namun disatu sisi akses pangan dalam memenuhi kebutuhan sangat terjangkau karena jarak desa dengan kota tidak cukup jauh, namun keterbatasan ekonomi yang menjadi penghalang di desa tersebut sehingga diperlukan campur tangan pemerintah.

Kondisi Ketahanan Pangan pada Desa Hargotirto yang dalam kondisi cukup tahan akan ketersediaan pangan yang unggul dari desa lain sebesar 2,72% namun dalam kategori akses pangan yang masih kurang dikarenakan area wilayah sering terjadinya bencana alam seperti pohon tumbang, bencana longsor yang areanya termasuk area perkebunan atau perbukitan, sehingga hal ini yang membuat akses pangan menjadi terganggu. Responden Desa Sidoharjo pada rumah tangga miskin di desa tersebut dalam kondisi cukup tahan pangan namun di aspek ketersediaan pangan Desa Sidoharjo masih dalam kondisi kurang tahan pangan, namun hal ini disebabkan wilayah yang masuk dalam kategori pegunungan, sehingga untuk menanam padi sangat sulit, disatu sisi sulitnya air dalam irigasi juga memicu daerah

kawasan pegunungan di Desa Sidoharjo, indikator akses pangan yang terkadang cukup sulit apabila sudah terjadi musim hujan, kewaspadaan akan bencana alam longsor yang mengakibatkan akses jalan tertutup, dan terkadang toko penyedia konsumsi pangan pokok tidak tersedia di beberapa tempat. Indikator stabilitas pangan serta kualitas pangan di Desa Sidoharjo masih dalam rata-rata terendah dibanding desa lain. Sehingga kondisi Ketahanan Pangan dengan diambil 3 (tiga) desa rawan pangan Kulon Progo, DIY perlu diperhatikan kembali karena dalam kategori cukup tahan pangan, apabila tidak terjadi perubahan yang positif disatu sisi kebijakan tidak terealisasi dalam peningkatan status sosial ekonomi, maka kondisi ketahanan pangan akan kurang tahan pangan.

2. Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin

Dalam mengembangkan ketahanan pangan rumah tangga miskin berdasarkan hasil dari model empiris dengan variabel Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah bahwa kedua variabel mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dalam mengembangkan ketahanan pangan pada rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo, DIY.

a. Hubungan Sosial Ekonomi (Soseko) dengan Ketahanan Pangan (Kepang)

Sosial ekonomi dengan indikator (Pendidikan dan Pendapatan) mempunyai pengaruh yang positif terhadap ketahanan pangan. Apabila semakin meningkat sosial ekonomi yaitu pendidikan dan pendapatan maka akan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga miskin.

Tabel 5. 11
Hasil Regresi Model Empiris

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PANG	<---	SOSEKO	.442	.098	4.519	***	par_1
PANG	<---	KEPEM	1.595	.321	4.963	***	par_2
KEPANG	<---	PANG	.117	.031	3.813	***	par_3
KEPANG	<---	KEPEM	.388	.127	3.041	.002	par_5

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Berdasarkan hasil model penelitian diatas sosial ekonomi mempunyai hubungan tidak langsung terhadap ketahanan pangan dilihat dari hasil nilai regresi dan korelasi semuanya sig < 0,05.

Hubungan Tidak Langsung:

a) Soseko ==> Pangan ==>Kepang

$$= (0,44) \times (0,12) = 0,05$$

b) Soseko ==> Kepem ==> Pangan ==>Kepang

$$= (0,01) \times (1,60) \times (0,12) = 0,002$$

Koefisien diatas berdasarkan hasil analisis jalur model empiris yang menggunakan metode *path analysis* disimpulkan bahwa sosial ekonomi mempunyai hubungan tidak langsung yang pertama yang nilainya lebih besar dari hubungan tidak langsung yang kedua maka hubungan yang sebenarnya adalah tidak langsung pertama. Oleh karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi yaitu pendidikan dan pendapatan memiliki efek secara tidak langsung yang positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo melalui variabel pola konsumsi pangan. Artinya semakin tinggi kondisi sosial ekonomi yaitu

tingkat pendidikan dan pendapatan maka menyebabkan konsumsi pangan semakin tinggi dan menyebabkan semakin tinggi tingkat ketahanan pangan rumah tangga miskin tersebut.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Josephine, Sinaga, Lubis, dan Darus (2017) dalam jurnal kajian faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat yang menyatakan bahwa kenaikan pendapatan akan menambah kenaikan pengeluaran pangan juga cenderung bagi ibu rumah tangga yang menambah atau mengubah menu makanan keluarga, baik dari segi kuantitas, kualitas, ataupun harga sehingga akan mempengaruhi pangan.

Hasil penelitian ini sejalan Damayanti dan Khoirudin (2016) dalam jurnal analisis faktor - faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga petani menunjukkan pengaruh pendapatan terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani di Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul yang menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan diikuti dengan ketahanan pangan meskipun kemungkinan peningkatan probabilitas pendapatan hanya sebesar 0,00% dan semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga diikuti dengan ketahanan pangan juga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Supriyanto (2014) yang menyatakan bahwa Pendidikan kepala keluarga dan pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap

peluang rumah tangga petani untuk tahan pangan dengan menganggap variabel lain konstan.

b. Hubungan Kebijakan Pemerintah (Kepem) dengan Ketahanan Pangan (Kepang)

Kebijakan Pemerintah dengan Indikator Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN), Lumbung Pangan merupakan Kebijakan Program Ketahanan Pangan Nasional untuk daerah-daerah. Kebijakan pemerintah ini sudah masuk tahun 2012 di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan variabel kebijakan pemerintah dengan ketiga indikator program tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap ketahanan pangan.

Tabel 5. 12
Hasil Regresi Model Empiris Ketahanan Pangan

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PANG	<---	SOSEKO	.442	.098	4.519	***	par_1
PANG	<---	KEPEM	1.595	.321	4.963	***	par_2
KEPANG	<---	PANG	.117	.031	3.813	***	par_3
KEPANG	<---	KEPEM	.388	.127	3.041	.002	par_5

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2017

Berdasarkan Hasil data diatas menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah (KEPEM) mempunyai hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan dilihat dari hasil nilai regresi dan korelasi bahwa Kebijakan Pemertintah terhadap ketahanan pangan mempunyai hasil yang signifikan, dimana nilai P yaitu 0,02 lebih kecil dari 0.05. dengan kata lain ($0,02 < 0,05$). Hubungan secara tidak langsung bahwa kebijakan pemerintah terhadap pangan mempunyai nilai

signifikan yaitu sebesar 0,000 dengan kata lain lebih kecil dari 0,05 atau dengan melihat analisis jalur model empiris dengan metode *path analysis*.

- Hubungan langsung:

$$\text{Kepem} \Rightarrow \text{Kepang} = 0,39$$

- Hubungan Tidak Langsung:

$$\text{Kepem} \Rightarrow \text{Pangan} \Rightarrow \text{Kepang}$$

$$= (1,60) \times (0,11) = 0,176$$

$$\text{Kepem} \Rightarrow \text{Soseko} \Rightarrow \text{Pangan} \Rightarrow \text{Kepang}$$

$$= (0,01) \times (0,44) \times (0,12) = 0,0005$$

Dikarenakan koefisien hubungan langsung antara kebijakan pemerintah dengan ketahanan pangan senilai 0,39 lebih besar dari hubungan tidak langsung yang pertama yaitu 0,176 dan kedua sebesar 0,0005. Maka hubungan yang sebenarnya adalah langsung yang nilai koefisien lebih besar daripada yang tidak langsung. Oleh karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah (Kepem) memiliki efek langsung yang positif terhadap ketahanan pangan (Kepang) rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo. Artinya semakin baik kebijakan pemerintah maka menyebabkan semakin tinggi ketahanan pangan rumah tangga miskin dan program-program kebijakan tersebut sangat efektif dalam menanggulangi desa rawan pangan, namun dengan diikuti pemantauan serta pelatihan agar semakin baik kebijakan tersebut meningkatkan

ketahanan pangan. Dari hasil lapangan Program Kebijakan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) yang dilaksanakan di desa tersebut dalam pengembangannya cukup positif, namun belum bisa meningkatkan pendapatan masyarakat karena belum optimalnya program dan hanya mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Siregar, Lubis, dan Emalisa (2013) mengemukakan bahwa hasil penelitian program Desa Mandiri Pangan (Demapan) berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sehingga hal ini akan meningkatkan ketahanan pangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyida (2012) bahwa Program Desa Mandiri Pangan di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul sebenarnya mempunyai dampak yang positif namun dalam pelaksanaan di desa Selopamiro belum bisa dijalankan secara efektif karena pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai harapan. Peran masing-masing lembaga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program belum optimal serta tidak adanya peningkatan usaha produktif yang dikelola kelompok. Hal ini yang mengakibatkan pada jumlah penerima manfaat yang tidak bertambah sampai tahap akhir pelaksanaan program.

Zuchainah (2010) mengemukakan Program Desa Mandiri Pangan berhasil meningkatkan status ketahanan pangan masyarakat, namun belum dapat secara efektif menurunkan kejadian rawan pangan

atau kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan kapasitas dasar masyarakat dan partisipasi masyarakat sasaran.

D. Analisis SWOT

Kebijakan pemerintah memiliki peranan penting untuk mensiasati permasalahan mengenai kerawanan pangan yang selama ini terjadi di rumah tangga miskin. Pengembangan melalui kebijakan pemerintah dan status sosial ekonomi tentunya memerlukan strategi yang tepat agar pengembangan yang dilakukan dapat sejalan dengan tujuan pengembangan. Pengembangan ketahanan pangan rumah tangga miskin yang sangat tepat dapat mengurangi kerawanan pangan suatu daerah sehingga untuk mencapai itu diperlukan strategi pengembangan, dan untuk merumuskan strategi apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan ketahanan pangan pada rumah tangga miskin di desa rawan pangan penulis menggunakan analisis SWOT yang biasa digunakan dalam perumusan strategi pengembangan

Analisis SWOT adalah sebuah analisis identifikasi berbagai faktor secara sistematis. Analisis ini didasarkan pada logika dimana dalam satu kesempatan dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), serta dapat meminimalisir kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Dalam proses pengambilan keputusan strategi akan selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi saat ini Rangkuti (2005).

Dalam menyusun strategi pengembangan ketahanan pangan rumah tangga miskin peneliti melakukan analisis SWOT dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai tahap pengumpulan data. Hasil identifikasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 13

Matriks SWOT Analisis Faktor Eksternal Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTH (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah 2. Mempunyai keanekaragaman pangan lokal 3. Mempunyai program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Lumbung Pangan, Desa Mandiri Pangan. 4. Mempunyai Program Bela-beli Kulonprogo 	<p style="text-align: center;">WEAKNESS (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan SDA yang belum optimal 2. Pengelolaan Pangan lokal yang masih rendah 3. SDM yang masih rendah 4. Kurangnya Pengoptimalan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL 5. Kurangnya perhatian kualitas pangan pada program lumbung pangan
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah 2. Dukungan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan sesuai (UU NO. 18 tahun 2012) 3. Kebutuhan dan permintaan komoditas pangan yang tinggi 4. Mengembangkan Keanekaragaman Pangan Lokal 5. Meningkatkan SDM 6. Meningkatkan Pendapatan dan Perekonomian Daerah 	<p style="text-align: center;">STRATEGIS S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan potensi sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan (S1, O2, O5) 2. Meningkatkan keanekaragaman pangan lokal dengan menggali potensi SDA dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan komoditas yang tinggi (S2, O1, O3) 3. Memanfaatkan Program KRPL untuk meningkatkan Perekonomian daerah melalui penciptaan teknik hidroponik 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengelolaan SDA agar nilai jual lebih guna mencapai peningkatan pendapatan (W1, O5, O2) 2. Meningkatkan SDM agar mampu mengelola potensi SDA untuk mengembangkan keanekaragaman pangan lokal dengan dukungan pemerintah. (W3, O1, O4, O2) 3. Mengoptimalkan program KRPL dan program kebijakan pemerintah yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan komoditas pangan yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan (W4,

<p>7. Penciptaan Koperasi Unit Desa (KUD) 8. Penciptaan Teknik Hidroponik</p>	<p>(S3, O5, O7) 4. Memanfaatkan Program DEMAPAN dalam mengembangkan SDM (S3, O5) 5. Mengembangkan program Lumbung Pangan menjadi KUD agar fungsinya tidak hanya menyimpan bibit padi namun juga menyalurkan beras secara langsung.</p>	<p>W5, O3, O5)</p>
<p style="text-align: center;">THREATS (T)</p> <p>1. Daya saing antar wilayah 2. Daya saing di era globalisasi 3. Bencana alam 4. Kerawanan Pangan</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGIS S-T</p> <p>1. Meningkatkan potensi lokal SDA guna dengan program Bela-Beli sehingga mampu bersaing antar wilayah maupun di era globalisasi (S1, S5, T1, T2) 2. Mengadakan keanakeragaman pangan lokal melalui pemanfaatan program kebijakan pemerintah seperti KRPL, DEMAPAN, Lumbung Pangan untuk menanggulangi kerawanan pangan Apabila terjadi bencana alam (S1, S3, T3, T4)</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <p>1. Pemberdayaan dalam meningkatkan mutu kualitas SDM agar mampu bersaing antar wilayah di era globalisasi 2. Meningkatkan mutu kualitas pangan lokal agar mampu menjadi substitusi pangan pokok nasi apabila terjadi kerawanan pangan</p>

1. Strategi Strengths-Opportunities (S-O)

Strategi S-O adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal guna memperoleh keuntungan bagi Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi desa rawan pangan. Beberapa alternatif strategi S-O yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan agar potensi lokal Sumber Daya Alam yang melimpah di Kulon Progo mempunyai nilai kontribusi yang besar terhadap perekonomian, melalui bantuan dari pemerintah dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam sehingga meningkatkan ketahanan pangan. Menurut hasil dari analisis dengan menggunakan metode analisis jalur secara empiris bahwa program kebijakan pemerintah mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan ketahanan pangan. Keberhasilan dalam meningkatkan potensi tersebut dengan program kebijakan pemerintah diharapkan agar, ketahanan pangan dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga miskin tercapai sehingga dapat menanggulangi desa rawan pangan.
- b. Meningkatkan keanekaragaman pangan lokal yang dimiliki yaitu pada singkong, jagung, umbi-umbian. Tercatat dalam tahun 2016 produksi Jagung sejumlah 73.066 ton dan umbi-umbian sebesar 107,934 ton sehingga potensi pangan lokal dari Sumber Daya Alam dapat menjadi substitusi dalam kebutuhan dan permintaan pangan yang tinggi

sehingga tidak terjadi kerawan pangan yang disebabkan ketergantungan pada beras.

- c. Memanfaatkan Program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dalam meningkatkan perekonomian melalui program optimaslisasi pekarangan dengan bantuan bibit sayuran, herbal dan lain-lain, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hal ini diketahui bahwa lahan pekarangan Kulon Progo yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik, oleh pemerintah dengan program kebijakan ini bisa membantu meningkatkan pendapatan, namun menurut penelitian program ini masih belum dimanfaatkan secara optimal, dan hanya mengurangi pengeluaran penduduk belum bisa menjadi sumber pendapatan, hal ini perlu eksistensi pemerintah dalam pendampingan agar dapat bermafaat dengan baik sehingga ketahanan pangan akan terwujud dan bagi masyarakat rumah tangga miskin yang kekurangan luas lahan pekarangan program KRPL dapat menggunakan hidroponik namun hal ini juga dibutuhkan pelatihan hidroponik serta pendampingan untuk mensiasati pekarangan rumah yang sempit.
- d. Memanfaatkan program desa mandiri pangan dalam meningkatkan SDM program desa mandiri pangan merupakan program kebijakan dari ketahanan pangan berupa dana yang dapat digunakan daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian program ini belum memberikan efek yang tinggi dikarenakan peranan *stakeholder* yang belum optimal sehingga dana yang diberikan pada desa hanya digunakan untuk

simpan pinjam tanpa adanya pendampingan dan pengawasan dari *stakeholder* terkait. Dibutuhkan pengembangan lainnya agar dana yang diberikan pada desa memberikan efek yang optimal dengan cara menggunakan dana yang diporeleh dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif dimana dana yang diberikan pemerintah digunakan untuk bantuan modal usaha melalui pendampingan, pengawasan serta penyuluhan oleh *stakeholder* terkait. Tujuan dari peningkatan SDM agar terjadi peningkatan pendapatan yang disebabkan meningkatnya SDM dimana kenaikan tingkat pendapatan akan meningkatkan tingkat kualitas pangan sehingga ketahanan pangan dapat tercipta.

- e. Mengembangkan program Lumbung Pangan menjadi KUD agar fungsinya tidak hanya menyimpan bibit padi namun juga menyalurkan beras secara langsung. Bantuan benih padi yang diberikan pemerintah belum bisa dikelola dengan baik sehingga benih padi hanya tertumpuk dan berjamur mengakibatkan hasil kualitas padi menurun, kebanyakan dari rumah tangga miskin tidak memerlukan benih padi untuk ditanam tetapi memerlukan beras sehingga diperlukan upaya dalam merevilatisasi lumbung pangan melalui pemberdayaan sistematis dan berkesinambungan dalam program lumbung pangan yang saat ini hanya digunakan untuk cadangan pangan namun dapat pula dijadikan tempat untuk rumah tangga miskin membeli beras secara langsung.

2. Strategi Weakness-Opportunities (W-O)

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di Kulon Progo sangat melimpah hal ini diungkapkan oleh Bupati Kulon Progo, namun dalam pengoptimalnya masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini perlu dukungan pemerintah yaitu dalam bentuk fisik maupun modal dalam memanfaatkan potensi daerah tersebut, dengan mengolahnya dari bahan mentah menjadi bahan jadi agar nilai jual produk potensi lokal tersebut menjadi lebih tinggi, seperti halnya : kayu menjadi kursi yang nilai jualnya lebih tinggi kursi, padi menjadi beras, yang nilai jualnya lebih tinggi beras agar pendapatan naik maka sesuai uji model secara teoritis pendapatan naik, maka akan mempengaruhi pangan yang juga naik dan akan meningkatkan ketahanan pangan serta derajat maupun status sosial ekonomi menjadi tinggi.
- b. Kualitas SDM yang bagus mampu mengelola SDA secara efektif dan optimal, sehingga akan menghasilkan hasil produk yang berkualitas juga. Daya saing yang tinggi merupakan modal awal untuk daerah mengeksport hasil produksinya. Strategi ini merupakan peningkatan SDM ke SDA dengan perkembangan teknologi. Strategi ini dapat direkomendasikan dalam mengatasi kelemahan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dikarenakan rendahnya kualitas SDM yang berada di

sektor pertanian dimana sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar pertama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo tercatat di tahun 2016 hasil panen 167.730 ton namun sebagian besar petani masih menggunakan alat yang manual oleh sebab itu dibutuhkan pemanfaatan perkembangan teknologi seperti pemanfaatan traktor atau mesin penggilingan padi.

- c. Mengoptimalkan program KRPL dan program kebijakan pemerintah yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan komoditas pangan yang tinggi untuk meningkatkan pendapatan. mengoptimalkan Program kebijakan pemerintah memberikan dampak positif untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan ketahanan pangan, secara tidak langsung program Kawasan Rumah Pangan Lestari apabila masyarakat, hasil pertanian melalui pekarangan ini bisa dimanfaatkan yaitu dijual dipasar, maupun di Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai penghimpun, untuk dikembangkan atau dijual di daerah lain, hal ini bisa meningkatkan pendapatan contohnya : masyarakat menanam sayur yang organik di desa tersebut dengan melihat potensi desa, yaitu, cuaca, suhu iklim cocoknya daerah tersebut dengan pertanian sayur atau palawija, atau tanaman herbal harus kita ketahui, setelah mengetahuinya membuat penglompokan dari setiap RT untuk memfokuskan menanam satu atau dua tumbuhan seperti cabe, sawi, terong dan lain-lain, namun tidak menutup kemungkinan untuk

menanam tumbuhan di lain sektor agar mengurangi pengeluaran, serta meningkatkan pendapatan.

Hal ini dilanjutkan pada program Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) ini dikhususkan kepada desa yang apabila daerah tersebut tidak cocok untuk dikembangkan pertanian, namun program ini juga sinergis terhadap program KRPL, dimana program ini memberikan bantuan dana, maka kepada masyarakat bisa digunakan untuk peningkatan kualitas SDM agar terjadi peningkatan pendapatan yang disebabkan meningkatnya SDM dimana kenaikan tingkat pendapatan akan meningkatkan tingkat kualitas pangan sehingga ketahanan pangan dapat tercipta.

- d. Program lumbung pangan yang merupakan bantuan cadangan pangan setiap desa hal ini efektif apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, namun disatu sisi mutu kualitas pada program ini perlu dipertimbangkan apabila dalam bentuk bantuan padi karena apabila tidak diolah hanya menumpuk dan berjamur mengakibatkan kualitas menurun. Diperlukan siasat untuk memperbaharui lumbung pangan dalam bentuk penyimpanan yang lebih aman, ataupun penyimpanan dengan teknologi yang terbaik agar mutu kualitas tidak menurun. Bantuan benih padi yang diberikan pemerintah belum bisa dikelola dengan baik oleh daerah rawan pangan, kebanyakan dari rumah tangga miskin tidak memerlukan benih padi untuk ditanam tetapi memerlukan beras sehingga diperlukan upaya dalam merevilisasi lumbung pangan

melalui pemberdayaan sistematis dan berkesinambungan dalam program lumbung pangan yang saat ini hanya digunakan untuk cadangan pangan namun dapat pula dijadikan tempat untuk rumah tangga miskin membeli beras secara langsung.

3. Strategi Strengths-Threats (S-T)

Strategi S-T merupakan strategi yang dibuat dengan menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal bagi pembangunan wilayah Kabupaten Kulon Progo. Beberapa alternatif strategi S-T yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan potensi lokal yaitu sumber daya alam Kulon Progo dengan mencanangkan program Bela-Beli Kulon Progo, disini dimaksudkan bahwa masyarakat Kulon Progo wajib membeli produk lokal daripada produk import, hal ini untuk melindungi masyarakat elemen paling bawah agar mampu bersaing antar wilayah dimana diwajibkan dengan membeli beras Kulon Progo, Air minum Kulon Progo dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian yang mandiri yang berasal dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat, apabila surplus bisa dijual antar wilayah daerah sehingga mampu berdaya saing dengan wilayah lain, maupun negara lain di era globalisasi. Strategi ini didasarkan pada tanggapan dari kekuatan SDA yang besar apabila dimanfaatkan secara optimal akan menghasilkan produk yang optimal dan terbaik, dimana kekuatan tersebut juga harus didukung oleh kualitas SDM yang memadai yaitu dengan meningkatkan

tingkat pendidikan yang lebih baik, pengalaman dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas agar menjadi profesional dalam bekerja sehingga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

- b. Peran pemerintah untuk mengatasi masalah kerawanan pangan yang menjadi momok didalam elemen masyarakat. Strategi yang tepat untuk mencegah kerawanan pangan akibat adanya bencana alam ataupun gagal panen, yaitu melakukan keberagaman pangan lokal, bahwa pangan itu bukan hanya nasi, oleh karena itu perlu adanya peningkatan keanakeragaman pangan melalui pemanfaatan program pemerintah seperti KRPL, Desa Mandiri Pangan, Lumbung Pangan, sehingga rawan pangan ini bisa dikurangi ataupun tidak terjadi apabila terjadi bencana alam maupun gagal panen. Pemerintah juga harus mendukung dan memberikan fasilitas yang optimal dalam keanekaragaman pangan untuk mengatasi kerawanan pangan akibat gagal panen maupun bencana alam.

4. Strategi Weakness-Threats (W-T)

Strategi W-T merupakan strategi yang diusulkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal yang ada. Beberapa alternatif strategi W-T yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Kelemahan yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo di desa rawan pangan yang berupa kurangnya mutu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemberdayaan sumber daya manusia apabila mengalami masalah gagal panen ataupun bencana alam sehingga mengakibatkan kerawanan pangan. maka untuk meningkatkan kualitas SDM yaitu dengan

pemberdayaan memberikan pelatihan mengenai kewirausahaan, pelatihan skill serta program kewirausahaan

E. Strategi Ketahanan Pangan Berdasarkan Analisis SWOT

Berdasarkan model ketahanan pangan yang didapatkan dari hasil penelitian ini maka strategi ketahanan pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan dengan cara:

1. Peningkatan program P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan)
 - a. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep kawasan rumah pangan lestari (KRPL).

Konsep kawasan rumah pangan lestari untuk desa rawan pangan konsep yang diajukan antara lain

- 1) Pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan membudidayakan tanaman sayuran antara lain kangkung darat, sawi, bayam, lombok, terong, kacang panjang dan lain-lain, melalui media tanah maupun hidroponik.
- 2) Pemanfaatan lahan pekarangan dengan membudidayakan ikan lele dengan sistem karamba.
- 3) Pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan membudidayakan tanaman buah-buahan yang tahan terhadap cuaca yang berganti ganti yang mempunyai harga jual relative tinggi.

2. Pengembangan pangan lokal

Umbi-umbian yang diproduksi oleh rumah tangga miskin sebagai salah satu pangan lokal tersebut perlu untuk ditingkatkan nilai tambahnya antara lain diolah menjadi:

- a. Tepung umbi-umbian,
- b. Keripik,
- c. Gethuk,
- d. Geplak
- e. Krupuk

3. Promosi dan sosialisasi P2KP

Perlu dilakukan promosi dan sosialisasi pada rumah tangga rawan pangan untuk tertarik melaksanakan program P2KP. Penysadaran bahwa program P2KP ini sangat bermanfaat bagi rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dan sisa dari pengkonsumsian dapat dijual sehingga mendapatkan uang sebagai tambahan pendapatan. Harapan dengan diimplementasikan program P2KP adalah rumah tangga meningkatkan ketahanan pangannya.

4. Peningkatan Demapan (Desa Mandiri Pangan)

Tujuan program desa mandiri pangan adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan (mengurangi kerawanan pangan) masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan tingkat pendapatan yang nantinya mempengaruhi peningkatan kualitas pangan sehingga mencapai ketahanan pangan.

5. Kerjasama antara Koperasi Unit Desa (KUD) dan Lumbung Pangan

Lumbung pangan dan KUD sangat diperlukan, selain untuk mengantisipasi kelangkaan pangan, dengan lumbung tersebut petani dapat menyimpan hasil panen padi pada saat panen raya sehingga harga jual padi yang jatuh dapat dihindarkan sedangkan fungsi KUD menghimpun dan menyalurkan beras. Mengembangkan program kerjasama Lumbung Pangan dan KUD agar fungsinya tidak hanya menyimpan bibit padi namun juga menyalurkan beras secara langsung. Bantuan benih padi yang diberikan pemerintah belum bisa dikelola dengan baik sehingga benih padi hanya tertumpuk dan berjamur mengakibatkan hasil kualitas padi menurun, kebanyakan dari rumah tangga miskin tidak memerlukan benih padi untuk ditanam tetapi memerlukan beras sehingga diperlukan upaya dalam merevilatisasi lumbung pangan melalui pemberdayaan sistematis dan berkesinambungan dalam program lumbung pangan yang saat ini hanya digunakan untuk cadangan pangan namun dapat pula dijadikan tempat untuk rumah tangga miskin membeli beras secara langsung.